

ANALISIS PAGU INDIKATIF KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis:

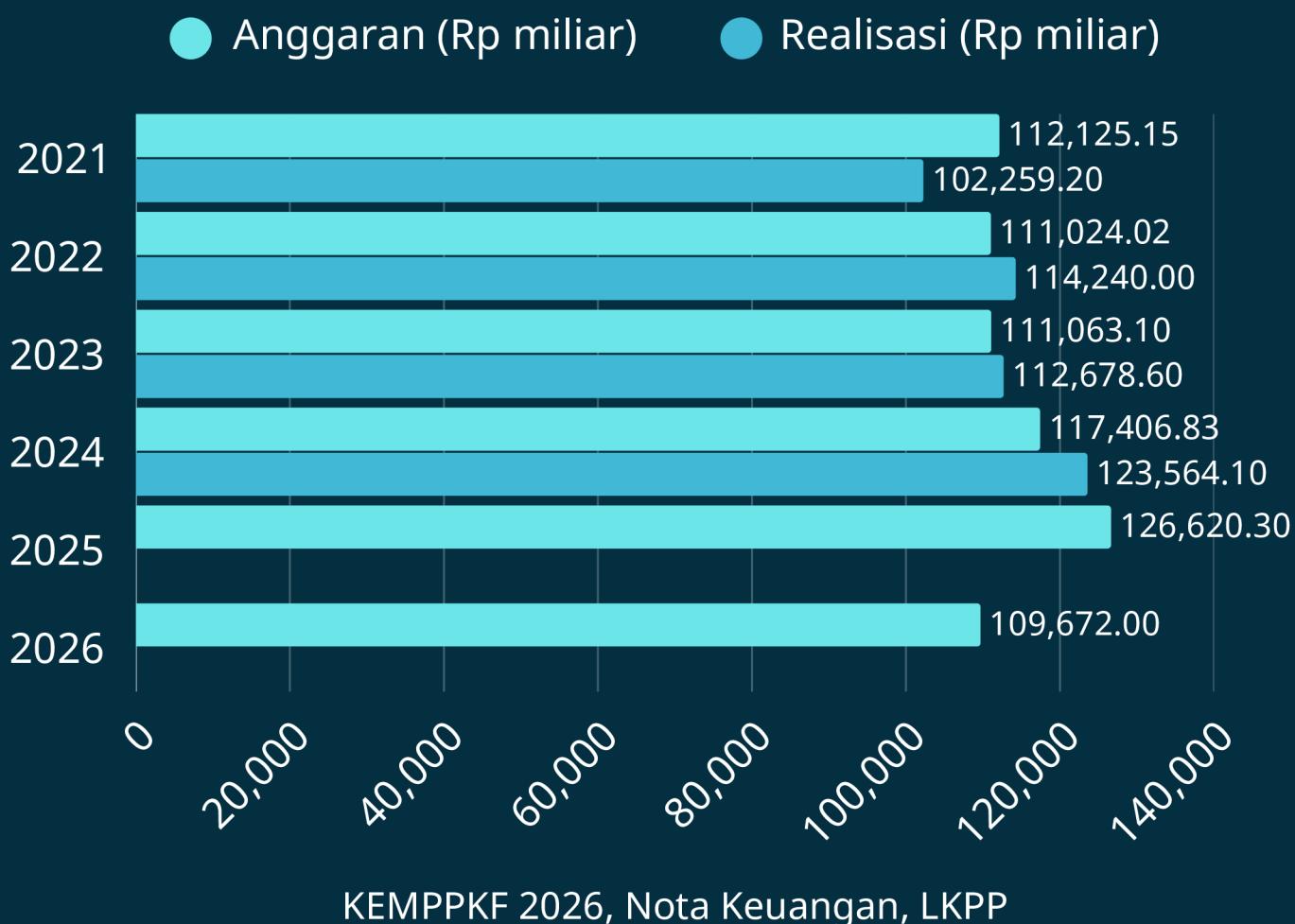
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si., Fachry Ali Firdaus, S.E., Tio Riyono S.E.,

JUNI 2025

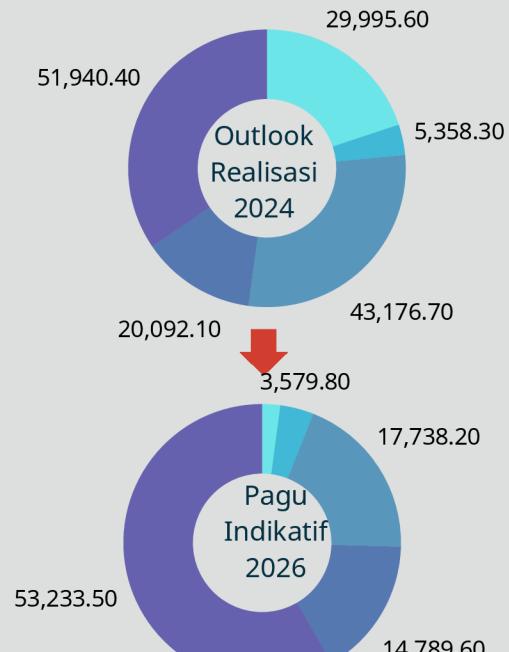
Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Pagu Indikatif 2026 Per Program	03
Penurunan Anggaran untuk Peningkatan Profesionalisme Polri	04
Penurunan Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan di tengah tingginya jumlah perkara tindak pidana	05
Polri dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	06
Output & Outcome Anggaran 2025	07
Polri dalam RPJMN 2025-2029	10
Gaji Polisi Paling Rendah dibandingkan Aparat Penegak Hukum Lainnya	11





Pagu Indikatif 2026



Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2026 mencapai Rp109,67 triliun. Pagu indikatif Polri di tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 13% dari besaran alokasi anggaran di tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan outlook realisasi anggaran tahun 2024, maka besaran pagu indikatif Polri tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 11%.

Pagu indikatif ini digunakan untuk membiayai 5 program kerja Polri, yaitu program dukungan manajemen, program modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta program profesionalisme SDM Polri.

Program Profesionalisme SDM Polri

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Program Modernisasi Almatsus dan Saran Prasarana Polri

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Dukungan Manajemen

Pagu Indikatif 2026 Per Program

HALAMAN 3



Program Dukungan Manajemen Mengalami Peningkatan di Tahun 2026

Komposisi alokasi pagu indikatif Polri pada Tahun 2026 mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan outlook realisasi anggaran 2024. Program dukungan manajemen masih menjadi program dengan alokasi anggaran terbesar dalam pagu indikatif 2026 ataupun outlook realisasi 2024. Namun dalam pagu indikatif 2026, besaran alokasi anggaran program dukungan manajemen mencapai Rp71,64 triliun atau sebesar 65% dari total anggaran Polri dalam pagu indikatif 2026. Peningkatan persentase ini terjadi karena adanya peningkatan alokasi anggaran program dukungan manajemen sebesar 37,92 % dibandingkan outlook realisasi 2024. Namun apabila dibandingkan dengan APBN 2025, maka alokasi anggaran program dukungan manajemen mengalami penurunan sebesar 1,14%. Program dukungan manajemen ini sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.



Penurunan anggaran Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri di tengah banyak kerusakan peralatan di Polri

Anggaran program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri dalam pagu Indikatif 2026 merupakan alokasi anggaran yang mengalami penurunan terbesar dibandingkan outlook realisasi anggaran 2024, sebesar 58,92%. Namun apabila dibandingkan dengan APBN 2025, alokasi anggaran program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri dalam pagu indikatif 2026 mengalami penurunan sebesar 61,22%. Padahal dalam IHPS II 2024 terdapat beberapa temuan terkait banyaknya peralatan di lingkungan Polri yang rusak dan/atau expired lisensinya. Hal ini tentunya akan berakibat pada tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Polri.

Penurunan Anggaran untuk Peningkatan Profesionalisme Polri

HALAMAN 4

Anggaran program profesional SDM Polri dalam pagu indikatif 2026 mencapai Rp1,93 triliun. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan outlook realisasi anggaran 2024 yang mencapai Rp3 triliun atau mengalami penurunan sebesar 35,64%. Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, alokasi anggaran program profesionalisme SDM Polri mengalami penurunan sebesar 20,18%. Penurunan alokasi anggaran ini berpotensi untuk menurunkan kuota pelatihan dan/atau pendidikan bagi SDM Polri. Penurunan kuota pelatihan yang tidak diimbangi dengan penerapan strategi lain guna peningkatan efisiensi personel akan berpotensi mengganggu pelayanan Polri kepada masyarakat.

Polri masih menjadi lembaga negara dengan pelaporan masyarakat tertinggi. Adapun jumlah laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan Polri mencapai 7.844 selama periode 2019 hingga Triwulan I 2024. Adapun dugaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kepolisian diantaranya penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan layanan dan lainnya. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan profesionalisme SDM Polri.

Namun di sisi lain, penilaian masyarakat terhadap Polri di tahun 2024 menunjukkan tren positif. Litbang Kompas (Juni 2024) menunjukkan bahwa 84,9% responden menilai positif atas pelayanan Polri secara keseluruhan. Lemkapi (Desember 2024) menyatakan bahwa 82,1% masyarakat puas dengan kinerja Polri di tahun 2024.

Namun, tantangan terbesar Polri ke depan adalah menjaga momentum peningkatan kepercayaan ini, khususnya dalam aspek integritas, keadilan, dan ketegasan dalam penegakan hukum. **Masyarakat mengharapkan Polri untuk terus berbenah, konsisten dalam menegakkan standar profesionalisme dan etika, serta menindak tegas setiap pelanggaran agar tidak merusak citra positif yang sudah dibangun.** Profesionalisme Polri tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari integritas, akuntabilitas, dan bagaimana mereka memperlakukan setiap individu secara adil dan manusiawi.

Penurunan Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan di tengah tingginya jumlah perkara tindak pidana

HALAMAN 5

Anggaran program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam pagu indikatif 2026 hanya sebesar Rp3,58 triliun. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 33,19% dibandingkan outlook realisasi anggaran program penyelidikan dan penyidikan tahun 2024 atau menurun sebesar 36,31% dibandingkan APBN 2025. Penurunan alokasi anggaran program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berpotensi menyebabkan menurunnya kinerja penegakan hukum, keterlambatan proses hukum, penurunan kualitas penyelidikan, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada Polri.

Pada semester I 2025, jumlah perkara yang masuk mencapai 210.544 perkara. Namun sebanyak 132.971 perkara yang belum diproses. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang menyebabkan Polri harus menetapkan prioritas atas kasus yang ditanggani. Tindak pidana yang dianggap lebih serius dan berdampak luas akan mendapatkan prioritas untuk ditanggani. Sedangkan tindak pidana seperti tindak pidana ringan, kasus pencurian dengan nominal kecil, penipuan dengan nominal kecil, menjadi kasus yang mengalami penundaan penanganan, penanganan kurang optimal, atau bahkan terabaikan. Kondisi ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Yang pada akhirnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri akan mengalami penurunan.

Optimalisasi anggaran perlu dilakukan agar pelayanan Polri kepada masyarakat tetap dapat dilakukan. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan **memprioritaskan belanja yang langsung mendukung inti fungsi penyelidikan dan penyidikan**. Selain itu Polri juga perlu mendorong **penyelesaian masalah di luar jalur hukum formal** untuk kasus-kasus ringan, melalui mekanisme *restorative justice*. Penyelesaian di luar jalur hukum formal diharapkan dapat mengurangi beban kerja Polri.

Anggaran program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pagu indikatif 2026 mencapai Rp71,64 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan outlook realisasi 2024 maupun dalam APBN 2025. Adapun penurunan alokasi anggaran program pemeliharaan ketertiban masyarakat mencapai 26,39% dibandingkan outlook realisasi 2024 dan sebesar 27,17% dibandingkan dengan APBN 2025. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan program dengan penurunan anggaran terkecil di Polri. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya memastikan berjalannya pembangunan nasional. **Penurunan anggaran yang drastis pada program ini berpotensi mengganggu stabilitas tersebut dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dalam jangka panjang.** Oleh karena itu, menjaga anggaran Kamtibmas agar tetap stabil merupakan langkah strategis untuk memastikan Polri tetap efektif dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Perkembangan teknologi yang ada saat ini diikuti dengan munculnya jenis kejahatan baru di masyarakat. Munculnya modus-modus baru di kejahatan siber, modus *money laundering*, kejahatan lingkungan, penipuan investasi bodong, kejahatan perbankan dan keuangan digital, serta serangan *lone wolf attack* menjadi modus kejahatan yang harus diantisipasi oleh Polri. Penguatan kapasitas siber, kerja sama internasional, literasi digital masyarakat, dan penegakan hukum yang transparan dan adaptif menjadi kunci dalam upaya Polri menjaga Kamtibmas di tengah dinamika kejahatan global. Hal ini tentunya memerlukan dukungan anggaran., baik untuk peningkatan kapasitas SDM Polri ataupun pengadaan sarana dan prasarana Polri.

→ **Target Sasaran/Outcome**

- Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional
- Terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi
- Terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal
- Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya ancaman dan gangguan
- Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan

→ **Target Keluaran/Output 2025**

- 209 rekomendasi/ kebijakan di bidang Pertahanan Keamanan
- 855 kesepakatan kerjasama
- Pendidikan Tinggi kepada 2.010 orang
- Pendidikan Non Gelar bagi 43.234 orang
- Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan bagi 3.965 orang
- 1.029 layanan dukungan manajemen internal
- Layanan manajemen SDM Internal kepada 328.100 orang
- 103 dokumen layanan manajemen kinerja internal
- Sertifikasi Profesi dan SDM pada 500 orang
- Pendidikan non gelar bagi 225 orang
- Pelatihan bidang Pertahanan dan Keamanan bagi 70 orang
- Penanganan 156.824 perkara
- 733 operasi bidang keamanan
- Penyidikan dan pengujian terhadap 217.670 produk
- 2.714 layanan data dan informasi publik
- 69.486 layanan dukungan manajemen internal
- 996 layanan manajemen internal
- 4.111 dokumen layanan manajemen kinerja internal
- Sertifikasi Profesi dan SDM bagi 10 orang
- 59 Penanganan Perkara
- 24.424 unit sarana bidang Pertahanan dan Keamanan
- 4.449 unit sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 209 unit prasarana bidang Pertahanan dan Keamanan

→ **Target Keluaran/Output 2025**

- 1 Unit OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
- 19.304 layanan dukungan manajemen internal
- 1 unit/paket layanan sarana dan prasarana internal
- 576 unit sarana bidang Pertahanan dan Keamanan
- 1.224 unit Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
- 11 rekomendasi kebijakan bidang Pertahanan dan Keamanan
- 283 kesepakatan kerja sama
- Pelayanan publik kepada masyarakat sebanyak 90.105.883
- Pelayanan publik lainnya sebanyak 6.733 layanan
- 1.225.344 operasi/hari operasi bidang keamanan
- 1.291.881 laporan pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
- 13.925 layanan dukungan manajemen internal
- Layanan manajemen SDM Internal kepada 2.000 orang
- 2.731 dokumen layanan manajemen kinerja internal
- 1 Layanan publik lainnya
- 82 peraturan lainnya
- 38 rekomendasi/kebijakan bidang pertahanan dan keamanan
- Sosialisasi dan Diseminasi kepada 54.151 orang
- Pelayanan publik kepada 1.971.530 orang
- Penyidikan dan Pengujian produk atas 105 produk
- 1 layana data dan informasi publik
- 1 Penelitian dan Pengembangan Purwarupa
- 18.227 layanan dukungan manajemen internal
- layanan manajemen SDM Interna; pada 383 orang
- 34.556 dokumen layanan manajemen kinerja internal
- 117 layanan perencanaan dan penganggaran
- 1 Operasi bidang keamanan

POLRI Dalam RPJMN 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali dan kondusif		
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
KEGIATAN PRIORITAS	Melakukan Peningkatan Kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan Pengamanan Objek Vital	Melakukan Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana	
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Terwujudnya aparat keamanan yang memiliki kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital sesuai dengan standar dan humanis	Terwujudnya penyelesaian tindak pidana oleh Polri secara efektif, efisien, dan tepat sasaran	
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	Indeks Hakamtibmas	<i>Crime rate</i>	<i>Clearance rate</i> tindak pidana
PROYEK PRIORITAS	1. Pengamanan Konflik Sosial yang Profesional dan Humanis 2. Pengamanan Obyek Vital	1. Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional 2. Penyelesaian Tindak Pidana Konvesional	

Gaji Polisi Paling Rendah dibandingkan Aparat Penegak Hukum Lainnya

Pada tahun 2024, Polri menempati posisi kelima sebagai lembaga terkorup di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional Indonesia. Peringkat ini sedikit memberikan kabar baik bagi Polri, mengingat pada tahun 2013 Polri merupakan lembaga terkorup. Perbaikan persepsi masyarakat terhadap Polri terjadi karena reformasi di tubuh Polri sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi meskipun tidak lagi dianggap sebagai lembaga negara paling korup, Polri tetap saja dianggap sebagai tempat paling sering terjadi praktik suap.

Korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari faktor kebutuhan yang harus mereka penuhi. Pada kenyataannya, gaji yang diterima anggota Polri setiap bulan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup khususnya kebutuhan order rendah selama satu bulan. Kondisi inilah yang mendorong anggota Polri melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh organisasi (XXXIX-A, n.d.).

Kompensasi finansial yang memadai sering kali dianggap sebagai prasyarat penting untuk menjaga integritas aparat penegak hukum. Argumen ini bersandar pada logika bahwa gaji yang kurang layak dapat menciptakan tekanan ekonomi pada individu, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara yang tidak etis atau ilegal, seperti pungutan liar atau menerima suap (Kompas.com, 2025; Mediajustitia.com, 2024). Teori homo economicus menyatakan bahwa manusia rasional cenderung bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi material, sehingga insentif legal yang tinggi (gaji dan tunjangan) diharapkan dapat mengurangi kemungkinan mencari keuntungan ilegal (maharani, 2016).

Perbandingan Gaji Polisi, Jaksa, dan Hakim

	Polisi	Jaksa	MA
	Ipda	Ajun Jaksa Madya – III a	Hakim Pemula -III a
Gaji Pokok	Rp2.954.200 - Rp4.779.300	Rp2.785.752 - Rp4.575.312	Rp7.799.960 - Rp12.810.560
Tunjangan Kinerja	Rp3.319.000	Rp4.595.150	-
Tunjangan Jabatan Fungsional		Rp2.400.000	Rp12.000.000 - Rp15.000.000
Total	Rp6.273.200- Rp8.098.300	Rp9.780.902 - Rp11.570.462	Rp18.799.960 - Rp27.810.560

Apabila dilakukan perbandingan gaji antar Aparat Penegak Hukum pada pangkat yang sama dan dalam posisi entry level, dapat dilihat bahwa Polisi memiliki gaji yang paling rendang dibandingkan dengan APH yang lainnya. Gaji Polisi hanya sebesar sepertiga dari gaji hakim pada posisi yang relatif sama.

Perbandingan Gaji Polisi di ASEAN

	Singapura	Brunei Darussalam	Malaysia	Filipina	Indonesia
	Police Sergeant/ Corporal	Lance Corporal/Corporal	Konstabel/Koperal	<i>Patrolman/ Patrolwoman</i>	Bripda
Gaji Pokok	SGD 1.800 - SGD 2.500	BND 1.500 - BNS 2.000	MYR 1.400 - MYR 2.500	PHP 29.000 - PHP 35.000	Rp 2.272.100 - Rp3.733.700
Total	SGD 2.500 - SGD 4.000	BND 2.000 - BNS 3.000	MYR2.400 - MYR 3.500	PHP 35.000 -PHP 45.000	Rp 4.565.100
Dalam Rupiah	Rp27.5 juta - Rp 44 juta	Rp22 juta - Rp33 juta	Rp7.9 juta - Rp11.5 juta	Rp9.6 juta - Rp12.5 juta	Rp 4.565.100

Gaji pokok polisi Indonesia terlihat kecil jika dengan gaji pokok polisi di wilayah ASEAN. Namun sistem tunjangan kinerja yang berlaku membuat total penghasilan mereka menjadi lebih kompetitif, terutama saat mencapai pangkat dan kelas jabatan yang lebih tinggi. Namun dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina jumlah take home paid polisi Indonesia menempati posisi terendah.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)